

Gerakan Anti-Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Demokratisasi di Indonesia

Havidz Ageng Prakoso & Ahmad Juhairi*

havidz.ageng@yahoo.com, ahmadjuhairi@gmail.com

Abstrak

Globalisasi, dalam klaim para globalis, akan membawa kehidupan demokratis ke seluruh dunia sebagai wujud kehidupan yang paling baik. Namun kenyataannya justru sangat kontradiktif, globalisasi telah menciptakan kekuasaan-kekuasaan global yang bersifat otoriter-oligarkis melalui Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional dan Perusahaan-Perusahaan Multinasional yang bekerja sama dengan negara-negara kaya. Karena itu, yang berdaulat dalam era globalisasi bukanlah rakyat sebagaimana dikehendaki demokratisasi, tetapi korporasi-korporasi internasional dan lembaga-lembaga keuangan internasional. Ada dua perspektif yang dapat menjelaskan hubungan demokratisasi dan gerakan anti-globalisasi, yaitu: perspektif anti-globalisasi dan perspektif demokratisasi. Anti-globalisasi adalah sebuah ideologi perlawanan untuk mengakhiri kekuatan korporasi multinasional, IMF, Bank Dunia, dan WTO sebagai instrumen kesepakatan global untuk pertumbuhan ekonomi. Sedangkan demokratisasi adalah realitas faktual perluasan demokrasi sebagai solusi bagi penciptaan kehidupan manusia yang lebih adil dan sejahtera. Gerakan Anti-Globalisasi lahir sebagai koreksi besar terhadap klaim para globalis. Gerakan ini menghendaki terwujudnya demokratisasi yang seutuhnya, yaitu, terwujudnya kedaulatan rakyat yang telah hilang akibat globalisasi dan terpenuhinya kesejahteraan sosial-ekonomi rakyat dan terjaminnya hak-hak sipil mereka.

Kata Kunci: *Anti-Globalisasi, Demokratisasi, Gerakan*

Abstract

Globalization in Globalist claim will make the better life in the world. But, in fact the reality is difference because globalization was made the dominance actors in the world which authoritarian-oligarchy like international financial organizations and multinational corporations in cooperation with developed countries. Therefore, in globalization era the sovereignty is always in international financial organizations and Multinational corporation hand, not in the society like what in democratization perspective. There are two prespectives explain about the relation between democratization and anti-globalization movement that is democratization perspective and anti-globalization perspective. Anti-globalization is the ideology which describe the opponent movement to finished the hegemony of Multinational Corporations, IMF, World Bank and WTO in economy consensus. Democratization in the other hand is the reality which explain that the enlargement of democracy is the solution to make the good life for peoples in the world. Anti-globalization movement is born as the correction to globalist claim. This movement has the purposes to make the sovereignty over the peoples which lost because of the globalization and in the other hand to fulfill their social welfare and civil right.

Key Words: *Anti-Globalization, Democratization, Movement*

* Korespondensi: Prodi. Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. GKB I Lt.6. Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas no. 246 Malang, telp. 0341-464318, Email: havidz.ageng@yahoo.com

Pendahuluan

Fenomena menguatnya ideologi neoliberalisme tersentralisasi pada semakin populernya wacana globalisasi dengan demokratisasi sebagai isu turunannya. Bagi para neoliberalis, dapat dipastikan tidak ada sesuatu yang negatif dari adanya globalisasi. Namun, kalau kita amati lebih jauh, globalisasi memiliki dampak negatif bagi negara-negara yang secara ekonomi maupun politik belum stabil, khususnya negara-negara bekas kolonial.

Ada beberapa aspek yang paling kentara dari dampak globalisasi; yakni: munculnya kekuatan baru perusahaan multinasional (MNC), perusahaan transnasional (TNC) dan bisnis internasional; perkembangan perdagangan internasional dan integrasi internasional (penyatuan-penyatuan mata uang internasional dan bisnis internasional); pertumbuhan dan membludaknya imigrasi internasional dan pasar tenaga kerja internasional; terjadinya keterbukaan dan interdependensi sistem internasional; dan terjadinya sistem moneter dan mata uang internasional (Hirst dan Thompson, dalam Qodir, 2009). Aspek-aspek tersebut menyebabkan semakin menguatnya hegemoni institusi-institusi global dalam sebuah negara, khususnya negara-negara dunia ketiga, sekaligus menjadi indikasi hilangnya kedaulatan rakyat yang mensyaratkan terpenuhinya kesejahteraan.

Dengan kata lain, globalisasi telah membawa malapetaka bagi kehidupan manusia dibandingkan kesejahteraan. Keuntungan yang didapat dari globalisasi tidak sebanding dengan akibat buruknya. Globalisasi dalam hal ini dianggap gagal mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dunia. Di lain hal, para neoliberalis selalu mengagung-agungkan demokrasi sebagai sistem pengelolaan negara paling baik dalam mewujudkan kesejahteraan. Akan tetapi, demokrasi yang mereka agung-agungkan itu bukanlah dalam bayangan ideal, yaitu kedaulatan rakyat. Perspektif demokrasi yang mereka bangun telah mereduksi makna kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan kaum pemilik modal (kapitalis) yang memiliki kekuasaan penuh melalui institusi-institusi keuangan dan perdagangan global, seperti IMF, Bank Dunia, WTO, serta MNC dan TNC.

Anggapan umum bahwa globalisasi adalah sebuah keniscayaan telah mengokohkan ideologi neoliberalisme. Karena itulah, analisis terhadap fenomena globalisasi sangat menarik untuk dilakukan sebagai awal mengkritisi neoliberalisme.

Sehingga tulisan ini, berangkat dari sebuah permasalahan bagaimana sesungguhnya neoliberalisme itu apabila dilihat dari fenomena globalisasi.

Anti-Globalisasi dan Demokratisasi dalam Perspektif

Sebagai argumen dasar, perlu penulis kemukakan bahwa mengkritisi neoliberalisme tidak dapat dilepaskan dari fenomena globalisasi dengan pengagungan para penganutnya pada demokratisasi. Globalisasi dan demokratisasi merupakan instrumen-instrumen penting bagi neoliberalisme untuk mengokohkan kekuasaannya dalam sistem ekonomi-politik internasional.

Perspektif anti-globalisasi yang dikemukakan oleh Gunaryadi (2014) bahwa Anti-globalisasi merupakan sebuah ideologi perlawanan untuk mengakhiri kekuatan korporasi multinasional, IMF, Bank Dunia, dan WTO sebagai instrumen kesepakatan global untuk pertumbuhan ekonomi. Apabila dilihat dari segi efek, protes yang dilakukan para aktivis anti-globalisasi itu memang mulai bergaung. Misalnya, dengan adopsi ide dan tuntutan mereka ke dalam agenda pertemuan-pertemuan Bank Dunia, IMF dan WTO. Kesediaan institusi internasional tersebut untuk berdialog dengan *Greenpeace* dan *Friends of the Earth* juga bisa dijadikan indikasi. Bahkan Presiden Bank Dunia, James Wolfensohn berkali-kali menegaskan bahwa ada kesamaan antara agenda yang diperjuangkan lembaganya dengan visi dan misi para aktivis demonstran itu yaitu sama-sama ingin mengentaskan kemiskinan di belahan dunia manapun.

Perspektif “demokratisasi”, di lain pihak, dikemukakan oleh Qodir (2009) bahwa perkembangan demokratisasi yang telah mengalami internasionalisasi tidak dapat dilepaskan dari semakin masifnya penyebaran globalisasi atas dasar semangat ideologi neoliberalisme. Hal ini tentu terkait dengan adanya klaim kaum globalis (sekaligus sebagai dalil globalis) yang mengatakan bahwa globalisasi akan membawa iklim demokrasi ke seluruh dunia (demokratisasi).

Demokratisasi atas dasar ideologi liberalis dalam pandangan Held (2007) dianggap sebagai agen kemajuan, dan kapitalisme sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang dapat berjalan. Beberapa komentator politik bahkan menyatakan (meminjam sebuah frase terkenal dari Hegelian) ‘akhir sejarah’ yaitu kemenangan Eropa Barat terhadap semua alternatif politik dan ekonomi. Keyakinan terhadap pertimbangan demokratisasi dan pemikiran orientasi pasar dapat dipulihkan secara penuh.

Adapun untuk mempertegas hal di atas, salah satu tokoh liberal sekaligus globalis, Francis Fukuyama (2004), seorang penasihat Kepresidenan Amerika Serikat, dalam bukunya yang berjudul *The End of History and The Last Man* mengatakan:

“Saya berpendapat bahwa demokrasi liberal mungkin merupakan “titik akhir dari evolusi ideologis umat manusia”, dan “bentuk final pemerintahan manusia”, sehingga ia bisa disebut sebagai “akhir sejarah”

Fukuyama melanjutkan pernyataannya:

“Dari Amerika Latin sampai Eropa Timur, dari Uni Soviet sampai Timur Tengah dan Asia, pemerintahan-pemerintahan yang kuat telah gagal pada dua dasawarsa terakhir ini. Sementara mereka tidak menemukan jalan menuju demokrasi liberal yang stabil, demokrasi liberal tetap hanya merupakan aspirasi politik koheren yang menjangkau perbedaan wilayah dan budaya di seluruh dunia. Di lain hal, prinsip-prinsip liberal dalam ekonomi – “Pasar Bebas” – telah menyebar, dan telah berhasil memproduksi kesejahteraan material yang belum pernah dicapai sebelumnya.....”

Klaim-klaim inilah yang menjadikan demokratisasi terhegemoni oleh kepentingan kelompok pendukung globalisasi yang berujung pada kecenderungan dipaksakannya demokratisasi pada bentuk tertentu. Bagi para pendukung globalisasi, demokratisasi sesuai dengan logika dan kepentingan globalisasi.

Kelahiran dan Perkembangan Gerakan Anti-Globalisasi

Ideologi anti-globalisasi merupakan sebuah ideologi perlawanan yang ingin melakukan suatu perubahan terhadap sistem yang sedang berlaku. Sistem yang dimaksud adalah globalisasi ekonomi yang berdasarkan pada prinsip neoliberalisme yang dipaksakan secara global. Menurut Qodir (2009), prinsip utama neoliberalisme adalah privatisasi, kebebasan perdagangan, persaingan bebas dan pengurangan subsidi untuk hal-hal yang sifatnya publik, seperti subsidi untuk sekolah yang dikelola negara, pengurangan subsidi rumah sakit yang dikelola negara (pemerintah), privatisasi BUMN menjadi milik swasta (bebas) sehingga mendapatkan keuntungan yang besar dan seterusnya. Prinsip neoliberalisme ini digunakan oleh IMF, Bank Dunia dan WTO dalam SAP (*Structural Adjustment Program*) yang seringkali dipaksakan kepada negara-negara penerima bantuan ketiga institusi tersebut sebagai prasyarat peminjaman hutang luar negeri.

Penelitian yang dilakukan oleh Haynes (2000) di sembilan negara miskin dan sedang berkembang yang mengadopsi SAPs seperti Turki, Filipina, Thailand, Ghana, Malawi, Kenya, Jamaika, Guyana, dan Ekuador, membuktikan kegagalan agenda IMF yang bahkan berakibat fatal bagi perikehidupan rakyat di negara-negara tersebut. Empat kesimpulan utama dari kegagalan tersebut adalah, *pertama*, pelaksanaan SAPs di bawah bimbingan Bank Dunia dan IMF hampir selalu menguntungkan bagi pertumbuhan ekspor dan hutang luar negeri; *kedua*, pengaruh SAPs terhadap investasi secara keseluruhan hampir negatif; *ketiga*, pengaruh SAPs terhadap pendapatan nasional dan arus keuangan eksternal adalah seimbang, netral; dan *keempat*, taraf kehidupan kaum miskin ternyata menurun di banyak negara berkembang, termasuk negara-negara yang telah mengalami penyesuaian struktural selama 1980-an. Hal terakhir ini terjadi akibat dari dua faktor, pertama dikurangnya subsidi pangan (dan banyak bidang lainnya) dan kedua, akibat dari pasarisasi harga (menyesuaikan dengan harga internasional).

Globalisasi dari perspektif kelompok neoliberal menurut Aminuddin et.al. (2009) memang menyandarkan pandangannya bahwa kemajuan dunia harus didapatkan dengan memposisikan sistem pasar bebas yang tidak terbatas sebagai sumber tatanan. Bagi para penganut ideologi anti-globalisasi tatanan tersebut merupakan tatanan yang menindas bagi mayoritas rakyat negara-negara miskin dan berkembang yang haus akan kesejahteraan.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka globalisasi dianggap sebagai alat ekspansi, eksplorasi, dan eksploitasi negara-negara kaya yang berideologikan neoliberalisme terhadap sumber-sumber daya alam negara-negara berkembang dan miskin. Globalisasi adalah penyebab kerusakan sumber-sumber kehidupan. Karena, suatu produk industri mau tidak mau pasti diproduksi dengan cara-cara mengeksploitasi lingkungan hidup, mencemari air dan udara, berkontribusi pada pemanasan global, meningkatkan penggunaan energi, dan untuk distribusinya membutuhkan infrastruktur berupa jalan raya, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik dan lain sebagainya (WALHI t.t.).

Guna kepentingan meningkatkan perdagangan bebas, kaum industrialis memaksa adanya standar lingkungan konsisten. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO: *World Trade Organization*) merespon usulan ini dengan mengeluarkan

kesepakatan standar minimum perlindungan lingkungan hidup bagi para pemodal. Kesepakatan itu menyebutkan standar yang dipakai adalah standar lingkungan hidup paling minimal. Artinya, setiap pengusaha asing yang bekerja pada sebuah negara lain, akan menggunakan peraturan pengendalian lingkungan hidup yang paling rendah standarnya (WALHI t.t.).

Pertanyaannya kemudian adalah apa sebenarnya motif munculnya ideologi anti-globalisasi yang terus mengancam eksistensi globalisasi? Hal ini terkait dengan persoalan demokratisasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Qodir (2009) Klaim kaum globalis atas globalisasi dan neoliberalisme bahwa pasar bebas dan demokrasi merupakan sesuatu yang sinonim. Dengan kata lain, klaim ini menganggap bahwa demokrasi dan pasar bebas dapat dipersatukan atau berjalan searah. Klaim ini kemudian pada akhirnya berimplikasi pada corak sistem ekonomi yang dianut kaum neoliberalis.

Maulana (2010) dalam penelitiannya menjabarkan bahwa Sistem ekonomi neoliberalisme memiliki lembaga-lembaga ekonomi internasional seperti IMF, WTO, dan World Bank yang memegang peran penting dalam penyebaran ideologi neoliberalisme di seluruh dunia. Munculnya lembaga-lembaga internasional tersebut pada level internasional semakin mengukuhkan kekuasaan neoliberalisme dalam mengontrol dinamika dunia internasional. Kondisi dunia saat ini bisa dikatakan telah di bawah kendali neoliberalisme melalui paket kebijakan dan program yang dijalankan oleh ketiga lembaga internasional tersebut. Namun, yang harus diingat adalah bahwa proses pembuatan konsensus dalam WTO senantiasa dikendalikan oleh negara-negara kuat seperti AS, Jepang, Uni Eropa, dan Kanada. Keputusan diambil secara informal melalui sistem oligarkis bentukan-bentukan perusahaan dagang raksasa yang ada dalam koridor organisasi dagang dunia dalam negosiasi-negosiasi "rahasia" selama pertemuan tingkat menteri WTO.

Mengikuti pandangan kaum neoliberal di atas, dalam kehidupan global, demokratisasi telah diyakini sebagai alternatif paling baik dalam mengelola kehidupan bernegara. Hampir tidak ada satu pun negara di dunia ini yang tidak menganut demokratisasi, walaupun tidak secara tegas memproklamirkannya, namun nilai-nilai demokrasi telah menggerogoti kehidupan rakyat negara tersebut. Faktanya, mayoritas

negara di dunia saling mengklaim sebagai negara paling demokratis di dunia. Hal ini tentu merupakan implikasi dari masifnya penyebaran ideologi globalisasi dewasa ini.

Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa mayoritas negara-negara di dunia telah atau akan bergerak menjadi negara yang demokratis. Bahkan dewasa ini, sebuah negara yang didirikan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan pun tidak dapat melepaskan diri dari keinginan untuk menjadi negara yang demokratis. Contohnya, Republik Islam Iran. Pada saat kepemimpinan Mahmoud Ahmadinejad sebagai presiden Iran, berani mengklaim bahwa negaranya adalah negara demokratis ketika Amerika Serikat dan beberapa negara Barat menuduh Iran sebagai negara teokratis. Secara prosedural, memang negara ini telah memenuhi prinsip-prinsip demokrasi dengan dilaksanakannya pemilihan umum dan digunakannya peraturan perundang-undangan sebagai dasar kehidupan bernegara. Artinya, berdasarkan sifatnya, searah dengan gerakan anti-globalisasi, demokratisasi juga merupakan gerakan transnasional yang menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu, sebuah kondisi demokratis, tetapi tidak dalam hegemoni kekuatan tertentu.

Relasi Gerakan Anti-Globalisasi dan Demokratisasi di Dunia

Kemunculan ideologi Anti-Globalisasi sangat berpengaruh terhadap perkembangan sebuah demokratisasi. Sebuah demokratisasi yang digiring pada upaya revitalisasi. Kemudian, berdasarkan ideologi gerakannya, dapat pula kita pahami bahwa para aktor gerakan ini memiliki pandangan yang berbeda dengan klaim para globalis di atas, yaitu: demokrasi dan pasar bebas (globalisasi secara umum) tidak dapat dipersatukan. Karena, adanya pasar bebas akan menghilangkan makna esensial dari sebuah demokratisasi yang berusaha mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam pasar bebas yang berdaulat adalah lembaga-lembaga internasional sebagai representasi kepentingan negara-negara minoritas terhadap negara-negara mayoritas yang memiliki strata sebagai negara miskin dan berkembang.

Gerakan anti-globalisasi merupakan alat revitalisasi demokrasi yang sangat diperlukan dalam rangka mengembalikan kedaulatan rakyat yang sudah terkikis oleh kekuasaan aktor-aktor globalisasi neoliberal. Selain itu, gerakan ini juga diperlukan dalam rangka menguatkan demokratisasi sebagai salah satu usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat dari kemungkinan intervensi aktor-aktor global (konsolidasi

demokratisasi). Artinya, untuk mengembalikan demokratisasi ke arah yang sebenarnya sebagai implementasi kedaulatan rakyat sepenuhnya yang sudah hilang akibat globalisasi, gerakan Anti-Globalisasi sangat diperlukan keberadaannya.

Diamond (2003) menyatakan bahwa di negara-negara yang sedang berada pada tahap transisi demokrasi, seperti Indonesia, pengaruh tersebut sangat terlihat jelas. Hal ini tidak terlepas oleh adanya usaha-usaha konsolidasi (penguatan) demokrasi yang sedang digalakkan. Seperti yang disinyalir Larry Diamond, bahwa konsolidasi menuntut adanya keterlibatan semua aktor politik, baik pada tingkatan elit maupun massa, namun keterlibatan tersebut tidak berindikasi pada penggulingan kekuasaan. Gerakan anti-globalisasi sebagai gerakan sosial sejatinya bukanlah merupakan gerakan penggulingan kekuasaan, tetapi sebagai gerakan alternatif yang berusaha mengarahkan/mempengaruhi kekuasaan pada terpenuhinya kedaulatan rakyat sepenuhnya, yaitu, terpenuhinya kesejahteraan rakyat.

Fenomena menguatnya ideologi anti-globalisasi sebagai ideologi perlawanan telah menjelma menjadi gerakan transnasional. Pelaksanaan demokratisasi yang kontradiktif dengan makna substansialnya sebagai usaha mewujudkan kedaulatan rakyat sepenuhnya merupakan fenomena global akibat menguatnya globalisasi. Hal ini memberikan kesempatan tersendiri bagi masyarakat sipil internasional untuk melakukan gerakan yang bersifat perlawanan terhadap kondisi tersebut. Tindakan perlawanan ini pun sepertinya telah menjadi budaya bagi mereka untuk membebaskan diri dari segala bentuk dominasi. Logika perlawanan inilah yang turut serta bagi munculnya Gerakan Anti-Globalisasi di seluruh dunia.

Masifnya gerakan anti-globalisasi ini sangat membantu bagi penguatan dan masa depan demokratisasi suatu negara. Oleh karena itu, adanya sebuah gerakan yang menuntut terpenuhinya kebutuhan riil rakyat sangat diperlukan sebagai alat kontrol sekaligus penguat demokratisasi. Demokratisasi yang tidak dalam pengertian prosedural saja dan semakin menguatnya hegemoni institusi-institusi global, akan tetapi demokratisasi yang lebih substansial dan semakin menguatnya kesejahteraan rakyat.

Menurut Tuname (t.t.) perwujudan demokrasi substansial hadir dalam kehidupan masyarakat yang adil. Keadilan itu mencakup keadilan secara sosio-politik dan ekonomi. Manusia lahir dengan derajat yang sama dan penghargaan terhadap kemanusiaan itu diekspresikan dengan pemenuhan rasa keadilan, keadilan dalam

politik, ekonomi, sosial dan budaya. Perjuangan manusia adalah perjuangan mewujudkan keadilan tersebut.

Hal yang senada dijabarkan oleh Eko (2010) bahwa Demokrasi substansial seperti yang dikehendaki oleh aktivis gerakan anti-globalisasi sebagai bentuk perlawanan terhadap globalisasi menurut Sutoro Eko sangat terkait dengan terjaminnya hak-hak sipil. Berbicara tentang terjaminnya hak-hak sipil, tentunya memiliki hubungan yang sangat erat dengan usaha-usaha mewujudkan rasa keadilan sosial, khususnya keadilan dalam bidang ekonomi yang dibuktikan dengan terpenuhinya kesejahteraan rakyat.

Pengaruh Gerakan Anti-Globalisasi terhadap Perkembangan Demokratisasi di Indonesia

Pada negara-negara berkembang, pengaruh gerakan anti-globalisasi terhadap demokratisasi sangat terlihat dengan jelas. Di Indonesia, misalnya, runtuhnya Orde Baru sebagai simbol kekuatan intervensi dan hegemoni institusi-institusi global di Indonesia oleh gerakan mahasiswa yang menuntut perubahan pada tahun 1998, berimplikasi pada menguatnya isu-isu menolak kehadiran institusi-institusi tersebut. Penolakan ini disuarakan oleh berbagai kalangan, mulai dari aktivis mahasiswa, akademisi, pengamat, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Kondisi di atas semakin menguat dengan terjadinya Gerakan Anti-Globalisasi berskala internasional pertama yang diorganisir di belasan kota di seluruh dunia pada tanggal 18 Juni 1999, terutama London, Inggris dan Eugene, Oregon, yang kemudian berlanjut dengan dilakukannya mobilisasi besar kedua dari gerakan ini pada tanggal 30 November 1999 di Seattle, Amerika Serikat. Di Indonesia pun terjadi Gerakan Anti-Globalisasi sebagai implikasi gerakan berkapasitas internasional tersebut. Hal itu dapat dibuktikan dengan terbentuknya *Forum Sosial Indonesia* (FSI).

Pada tanggal 16-21 Januari 2004, dalam ajang *World Social Forum* (WSF) Mumbai, India, sebanyak 80 aktivis Indonesia datang dan aktif dalam acara-acara di WSF. Ini merupakan keikutsertaan terbesar delegasi Indonesia dalam WSF. Kemudian, pada tanggal 18 Januari 2004 diadakan diskusi di Mumbai mengenai "*WSF dan Forum Sosial Indonesia*". Ini adalah awal dimulainya FSI sebagai penyambung semangat WSF dan juga kebutuhan akan konsolidasi gerakan sosial di Indonesia, yang akan segera

ditindaklanjuti setelah kepulangan delegasi ke tanah air. WSF merupakan satu bentuk 'perlawanan' global (anti-globalisasi) terhadap skema pembentukan ekonomi global yang setiap tahunnya dibahas dalam pertemuan World Economic Forum (WEF). Forum ini hanya hendak dijadikan ajang terbuka bagi pertukaran pengalaman, gagasan, dan perspektif alternatif yang telah dan akan dikembangkan oleh berbagai kekuatan penentang skema globalisasi yang didominasi oleh kaum neo-liberal (Globaljust.com).

Dalam pertemuan persiapan pembentukan FSI di Yogyakarta pada tanggal 20-21 Februari 2004, sepulang dari menghadiri WSF Mumbai, maka telah disimpulkan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, adanya pertemuan delegasi Indonesia yang berangkat ke World Sosial Forum IV di Mumbai, India, pada Januari 2004 yang dihadiri sekitar 80 orang aktivis, yang menghasilkan kesepakatan untuk mengadakan Forum Sosial Indonesia. *Kedua*, adanya proses internalisasi dan inspirasi dari semangat (spirit) perlawanan forum rakyat dunia yang berkumpul di Mumbai untuk menandingi *World Economic Forum* (WEF) di Davos, tempat di mana para pimpinan kapitalis berkumpul untuk menata tatanan masyarakat dunia ini dengan "kehendak kerakusan" mereka. Dengan slogan "*Another world is possible*", maka seluruh rakyat dari berbagai dunia berkumpul untuk meneriakkan semangat anti neo-liberal, global kapitalis dan seluruh infrastruktur institusionalnya. Ini dikarenakan mayoritas rakyat dunia telah menjadi korban dari dominasi imperialisme yang mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan penindasan politik. (Globaljust.org).

Platform dasar forum ini adalah Anti Neo-Liberalisme, Anti-Globalisasi Kapitalis dan Anti-Rezim Anti Rakyat di Indonesia. Sedangkan tujuan utama FSI adalah terwujudnya konsolidasi masyarakat sipil Indonesia yang mencerminkan platform dasar dan visi FSI bagi penguatan gerakan sosial (Globaljust.org). Adapun tujuan khususnya adalah: 1.) Terlaksananya berbagai program dalam penyelenggaraan FSI untuk menjadi wadah demokratis bagi pertukaran pemikiran, perumusan alternatif, inisiatif-inisiatif baru, ekspresi seni dan budaya, aspirasi demokratis, aksi-aksi kreatif, dan berbagai hal lain yang mungkin; 2.) Adanya penguatan, pemberdayaan, inspirasi, pencerahan, refleksi, kreasi dan sebagainya dari para peserta FSI; 3.) Adanya kerja sama yang erat di antara berbagai organisasi, lembaga dan kelompok masyarakat sipil dalam penyelenggaraan FSI; 4.) Adanya konsolidasi sesama aktivis dalam membangun gerakan sosial yang kuat. Cakupan isu dalam FSI di antaranya mengenai: privatisasi,

perdagangan, industrialisasi, kedaulatan pangan, dan lain-lain (globaljust.org). Isu-isu tersebut jelas searah dengan isu-isu yang berkembang dalam gerakan anti-globalisasi.

Forum ini sangat representatif sebagai Gerakan Anti-Globalisasi yang terorganisir secara nasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya organisasi-organisasi partisipan dalam forum tersebut. Organisasi-organisasi yang dimaksud antara lain: *Koalisi Anti Utang* (KAU), The Business Watch Indonesia, Tim Relawan Untuk Kemanusiaan, Indonesia People's Forum, WALHI, *Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi* (LMND), *Front Mahasiswa Nasional* (FMN), Insist, Suara Ibu Peduli, *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara* (AMAN), *Serikat Pekerja* (SP), *Serikat Buruh Seluruh Indonesia* (SBSI), Suara Keadilan, *Persatuan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia* (PMKRI), *Himpunan Mahasiswa Islam* (HMI), Komunitas Anging Mamiri, *Aliansi Reforma Agraria* (AGRA), Bina Desa, dan lain sebagainya. Kelompok masyarakat adat yang tergabung dalam *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara* (AMAN) atau kelompok petani yang tergabung dalam *Aliansi Reforma Agraria* (AGRA) tidak lagi bergerak sebagai masyarakat adat atau petani dalam sebuah gerakan sosial tetapi sebagai kelompok yang sama-sama menjadi korban globalisasi dengan kelompok lainnya dalam satu wadah perjuangan, yaitu, *Forum Sosial Indonesia* (FSI).

Di lain pihak, WALHI secara lebih spesifik juga menyuarakan ketidakadilan bagi rakyat akibat dominasi institusi-institusi global. Hal itu terlihat dari nilai-nilai perjuangannya yang dikenal dengan Manifesto WALHI, diantaranya: 1.) *Demokrasi*: seluruh rakyat harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan apa pun yang akan berdampak bagi keberlanjutan kehidupan rakyat; 2.) *Keadilan antar Generasi*: semua generasi baik sekarang maupun mendatang berhak atas lingkungan yang berkualitas dan sehat; 3.) *Keadilan gender*: semua orang berhak memperoleh kehidupan dan lingkungan hidup yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, agama dan status sosial; 4.) *Penghormatan Terhadap Makhluk Hidup*: semua makhluk hidup baik manusia maupun non manusia memiliki hak dihormati dan dihargai; 5.) *Persamaan Hak Masyarakat Adat*: masyarakat adat di seluruh pelosok nusantara berhak menentukan nasibnya sendiri untuk berkembang sesuai kebudayaannya; 6.) *Solidaritas sosial*: semua orang memiliki hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sama; 7.) *Anti Kekerasan*: negara dilarang melakukan kekerasan fisik dan non fisik kepada seluruh rakyat; 8.) *Keterbukaan*: seluruh rakyat berhak atas semua informasi berkenaan dengan

kebijakan dan program yang akan mempengaruhi kehidupannya; 9.) *Keswadayaan*: semua pihak diharapkan mendukung keswadayaan politik dan ekonomi masyarakat; 10.) *Profesionalisme*: semua pihak hendaknya bekerja secara profesional, sepenuh hati, efektif, sistematis dan tetap mengembangkan semangat kolektivitas (WALHI, t.t.).

Lahirnya FSI dan Manifesto WALHI dengan nilai-nilai perjuangannya merupakan bukti bahwa wacana dan ideologi anti-globalisasi telah menyebar di Indonesia. Penyebaran ideologi ini akan semakin menguat seiring makin kuatnya kekuasaan institusi globalisasi neo-liberal, seperti IMF dan Bank Dunia, termasuk perusahaan-perusahaan multi nasional (MNC) yang menyebabkan hilangnya kedaulatan rakyat Indonesia (*dedemokratisasi*). Hal itu tidak terlepas dari kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan negara. Penjelasan selanjutnya yang merupakan bentuk kontradiksi dari demokratisasi sekaligus menjadi pemicu munculnya Gerakan Anti-Globalisasi yang memiliki pengaruh sangat besar bagi masa depan demokrasi di Indonesia.

Soepriyatno (2008) menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah saat itu telah mendorong perekonomian Indonesia ke jebakan utang (*Debt Trap*) yang lebih dalam. Tingkat ketergantungan Indonesia kepada utang luar negeri sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga kita tidak dapat melepaskan diri lagi dari kenyataan bahwa yang memerintah Indonesia sudah bukan pemerintah Indonesia sendiri. Kita sudah kehilangan kedaulatan dan kemandirian dalam membangun diri sendiri. Ketergantungan itu diperparah dengan dimintanya IMF membantu Indonesia dalam menghadapi krisis pada tahun 1997/1998.

IMF pun memaksakan kehendaknya mengintervensi semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam *Letter of Intend* (LOI) yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia terdapat 1.243 tindakan yang harus dilaksanakan pemerintah dalam berbagai bidang seperti perbankan, sistem desentralisasi, kebijakan fiskal, moneter dan bank sentral, privatisasi BUMN, membuka investasi asing, lingkungan dan jaring pengaman sosial (Soepriyatno 2008). Pasca runtuhnya Orde Baru ternyata tidak secara otomatis menghilangkan hegemoni institusi global di Indonesia. Negara ini terus dihantui oleh beban hutang yang semakin besar akibat diterimanya bantuan IMF dalam penanganan krisis 1998.

Berdasarkan kebijakan dan diplomasi Pemerintah RI, pada tahun 2009 jumlah utang luar negeri Indonesia akan meningkat. Indonesia akan menambah utang dari ADB, Amerika Serikat, Australia, dan lembaga/negara lain (Nusantaranews t.t.). Perkembangan hutang dan ketergantungan pemerintah yang terus meningkat tentunya akan berimplikasi pada kemiskinan yang semakin besar. Sebagai konsekuensinya adalah lahirnya produk-produk kebijakan yang harus memihak pada Konsensus Washington yang termuat dalam SAP, misalnya yang terkait dengan penghapusan subsidi dan privatisasi BUMN.

Di Indonesia, kebijakan penghapusan subsidi BBM yang ditekan oleh IMF dan dibahas pula pada pertemuan CGI ke-10 dan ke-11 akhirnya direalisasikan oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid. CGI (Consultative Group on Indonesia) merupakan konsorsium negara-negara dan lembaga-lembaga kreditor dan donor untuk Indonesia yang dibentuk 1992 sebagai pengganti konsorsium yang sama yaitu IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia). CGI terdiri dari sekitar 30 kreditor bilateral dan multilateral di antaranya World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), International Monetary Fund (IMF), dan pemerintahan negara-negara industri seperti Jepang, Amerika Serikat, United Kingdom, dan lain-lain (Nafis, 2009:36).

Pada 16 Juni 2001 pemerintah secara resmi mengumumkan harga baru produk BBM yang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 30 persen yang kemudian dilanjutkan pada era pemerintahan Megawati. Bahkan pemerintahan Megawati dengan tegas menyatakan komitmennya untuk menaikkan harga BBM rata-rata 30 persen pada Januari 2002. Begitu pula dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pencabutan subsidi BBM juga berlangsung secara masif dengan adanya pengumuman Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2005.

Sementara itu, kebijakan privatisasi pertama kali diatur pemerintah tahun 2001 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tentang Tim Kebijakan Privatisasi BUMN. Dalam pasal 8 Keppres ini dinyatakan bahwa salah satu tujuan privatisasi BUMN adalah untuk meningkatkan *good corporate governance*, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham BUMN. Kebijakan privatisasi BUMN juga memiliki dasar hukum melalui UU No. 19/2003 tentang BUMN. Dengan kebijakan ini, privatisasi diarahkan dengan cara menjual saham negara (divestasi) dan sekaligus menjual saham baru (dilusi) (Nafis 2009). Sejak

bergulirnya Era Reformasi, antara tahun 2001 sampai tahun 2006, pemerintah telah melakukan privatisasi berbagai perusahaan Indonesia. Tabel berikut menggambarkan hal tersebut:

Tabel 1: Daftar Privatisasi dari Tahun 2001 – 2006

Tahun	Bentuk Privatisasi
2001	Pemerintah menjual 9,2% saham Kimia Farma, 19,8% saham Indofarma, 30% saham Sucofindo, 11,9% saham PT Telkom. Salah satu alasannya adalah untuk memenuhi anggaran pendidikan senilai Rp 43 Triliun.
Mei 2002	Privatisasi Indosat tahap pertama dengan target penjualan 11,32% (117,174 juta) saham.
Akhir 2002	Privatisasi Indosat tahap kedua dengan penjualan saham pemerintah hingga 41,49% kepada Singapore Telemedia Pte. Ltd. (STT) yang dimiliki Temasek.
2003	Setidaknya terdapat 10 BUMN yang masuk daftar privatisasi. Salah satunya adalah BRI yang dijual sebesar 30% sahamnya.
2004	Pemerintah melakukan privatisasi terhadap Merpati Nusantara, PTPN III, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bandara Soekarno Hatta, PT Aneka Tambang, dan PT Timah.
2005	Pemerintah menerbitkan PP No. 33/2005 tentang Tata Cara Privatisasi BUMN. Melalui pasal 5, privatisasi dilakukan dengan cara penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal, penjualan langsung kepada investor, dan penjualan kepada manajemen dan atau karyawan Persero yang bersangkutan
2006	Pemerintah melakukan penjualan saham Perusahaan Gas Negara (PGN) maksimal 5,31%. Pada tahun ini juga, Presiden SBY mengeluarkan keputusan tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan, KEPRES No. 18/2006 yang semakin menguatkan kebijakan privatisasi di Indonesia secara sistemik.

Sumber: M. Danial Nafis, 2009, *Indonesia Terjajah: Kuasa Neoliberalisme atas Daulat Rakyat*, Jakarta: INSIDE Press, hal. 119-120.

Sebagaimana dijabarkan oleh Soepriyatno (2008) Ketidakberdayaan pemerintah ini diperparah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2008 pada tanggal 4 Pebruari 2008 yang mengizinkan pembukaan hutan untuk pertambangan. Menurut Soepriyatno, peraturan pemerintah tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi 13 perusahaan yang menambang di hutan lindung. Sebagian besar adalah perusahaan tambang asing raksasa, seperti Freeport dari AS, Rio Tinto dari Inggris, Inco dari Canada, dan Newcrest dari Australia. Kondisi tersebut menggambarkan betapa minimnya kewenangan negara dalam mengelola Sumber Daya Alam yang telah diprivatisasi (baca: pengelolaannya diserahkan pada swasta, khususnya perusahaan-perusahaan asing). Mengingat, kebijakan privatisasi ini merupakan konsekuensi dari diterimanya bantuan dana dari IMF dan Bank Dunia.

Seperti halnya di sektor buruh, akibat dikeluarkannya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, nasib buruh semakin tidak jelas dan tertindas. Ada dua alasan yang menyebabkan hal itu terjadi, yaitu: *pertama*, diberlakukannya sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dengan PKWT, perusahaan dapat mempekerjakan buruh kontrak untuk pekerjaan-pekerjaan jenis tertentu dalam waktu tertentu. *Kedua*, diberlakukannya sistem *outsourcing*. Dalam hal ini perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Baca pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003. Implikasi dari kebijakan *outsourcing* banyak perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan buruhnya untuk selanjutnya direkrut kembali melalui perusahaan jasa pekerja (*outsourcing pekerja*) (Habibi 2009). Kebijakan ini merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan rakyatnya yang berprofesi sebagai buruh. Nasib mereka diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Ketika pasar kelebihan produksi, perusahaan akan melakukan PHK secara sepihak tanpa memperhatikan nasib kaum buruh.

Hal di atas menunjukkan bahwa kekuasaan dan dominasi lembaga-lembaga internasional di Indonesia sangat kuat. Akar penyebabnya adalah pembukaan pasar dan privatisasi besar-besaran pengelolaan BUMN. Dalam pengelolaan BUMN, khususnya dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam, keuntungan dari pengelolaan tersebut seharusnya menjadi milik negara dan digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi, kenyataannya yang diuntungkan dan dimakmurkan dari pengelolaan tersebut adalah pihak asing dan segelintir anak bangsa yang secara ekonomi memang tergolong kaya.

Masa Depan Demokrasi Indonesia

Hadirnya Globalisasi Neoliberal di Indonesia yang menuntut adanya perpaduan antara pasar bebas dan demokrasi, sama sekali tidak menguntungkan bagi rakyat Indonesia. Justru proses perpaduan ini semakin memperbesar ketimpangan ekonomi yang berujung pada sulitnya pemenuhan kesejahteraan rakyat. Kondisi ini

semakin diperparah oleh proses globalisasi yang menjadikan pola hubungan negara-negara di dunia seperti sebuah lingkaran yang kemudian terpolakan sebagai sistem internasional yang membagi negara-negara dalam strata-strata, Dunia Pertama yang identik sebagai negara-negara kaya dan maju dan Dunia ketiga yang lebih identik dengan negara-negara miskin dan berkembang.

Pola hubungan tersebut menggambarkan bahwa tidak ada satu pun negara yang mampu hidup tanpa berhubungan dengan negara lain, apa pun status negara tersebut. Namun permasalahannya adalah siapa atau negara mana yang diuntungkan dari kesalingterhubungan ini?. Apakah semua yang terlibat mendapat keuntungan atau negara tertentu saja?.

Indonesia sebagai salah satu negara Dunia Ketiga, sebenarnya sama sekali tidak diuntungkan dengan kesalingterhubungan ini. Hal ini terbukti dengan kerjasama yang dilakukan dengan negara lain, khususnya negara-negara Dunia Pertama seperti Amerika Serikat, tidak banyak keuntungan yang didapat oleh negara ini. Kehidupan rakyatnya semakin tidak sejahtera dengan ditandai oleh tingginya angka kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan tersebut merupakan akibat gagalnya pemerintah mewujudkan kesejahteraan untuk rakyatnya. Ketersediaan devisa negara dihabiskan untuk membayar hutang luar negeri. Selain itu, kondisi ini semakin diperparah dengan hilangnya kesempatan rakyat untuk mengelola kekayaan alamnya sendiri akibat tuntutan privatisasi dari para kreditor global. Artinya, kesalingterhubungan antara negara-negara Dunia Pertama dengan negara-negara Dunia Ketiga, akan berimplikasi pada dirugikannya negara-negara semipinggiran dan pinggiran dan diunggulkannya negara-negara pusat dalam setiap melakukan kerjasama. Hal ini akan lebih diperparah oleh sistem keuangan internasional yang seringkali tidak bersahabat bagi negara-negara Dunia Ketiga.

Dalam sistem keuangan internasional, negara-negara Dunia Pertama dalam aktivitasnya selalu bergandeng tangan dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Karena itulah, negara-negara maju dan kaya selalu mengkampanyekan adanya pasar bebas dan privatisasi yang pada akhirnya akan memudahkan perusahaan-perusahaan tersebut masuk ke sebuah negara. Hal itu dimaksudkan demi sebuah akumulasi modal yang didapat dari kerjasama yang dilakukan dengan negara-negara Dunia Ketiga.

Hal itu menunjukkan bahwa dengan menjamurnya perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia yang seringkali memperlakukakan pejabat-pejabat negara untuk mengukuhkan kekuasaannya akan menyebabkan hancurnya sistem perekonomian negeri ini. Hasil-hasil pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di negeri ini, pada akhirnya sebagian besar menjadi milik perusahaan-perusahaan pemilik modal, khususnya pemilik modal asing, bukan bangsa dan rakyat Indonesia.

Prayitno (t.t.) menjabarkan bahwa demokratisasi di Indonesia terkesan hanya untuk mereka dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang cukup. Sedangkan bagi golongan ekonomi bawah, demokrasi belum memberikan dampak ekonomi yang positif buat mereka. Inilah tantangan yang harus dihadapi dalam masa transisi. Demokrasi masih terkesan isu kaum elit, sementara ekonomi adalah masalah riil kaum ekonomi bawah yang belum diakomodasi dalam proses demokratisasi. Demokrasi yang menjanjikan kebebasan bagi setiap orang untuk berkarya, justru termonopoli oleh kekayaan materiil segelintir orang.

Keberhasilan demokrasi hanya cukup diukur dengan cara-cara yang prosedural, seperti dengan dilaksanakannya pemilu, adanya partai politik dan dewan perwakilan rakyat serta lembaga-lembaga negara lainnya, atau dianutnya sistem presidensial. Dengan kata lain, demokratisasi di Indonesia belum mampu menjawab sebuah persoalan yang sangat urgen, yaitu, bagaimana mewujudkan kedaulatan rakyat seutuhnya?

Oleh sebab itu, gerakan anti-globalisasi yang dipelopori oleh FSI (*Forum Sosial Indonesia*) dan WALHI misalnya, telah menggiring demokratisasi pada usaha-usaha mewujudkan kedaulatan rakyat seutuhnya. Berdasarkan ideologi gerakannya yang menentang adanya dominasi IMF, Bank Dunia, WTO, dan Perusahaan Multinasional yang dianggap menghambat demokratisasi, dapat kita pahami bahwa demokratisasi di Indonesia harus lebih dimaknai dan diusahakan pada sesuatu yang lebih substansial. Yaitu, terwujudnya kesejahteraan rakyat. Sangat mustahil rakyat Indonesia bisa berdaulat seutuhnya kalau mereka masih belum sejahtera. Mustahil dapat berdaulat kalau kemiskinan, kelaparan dan ancaman menganggur bagi kaum muda masih menjadi permasalahan utama mereka. Dengan kata lain, pada Orde Reformasi ini, Gerakan Anti-Globalisasi telah memberikan ukuran yang mutlak untuk demokratisasi Indonesia bahwa negara ini bisa dikatakan demokratis apabila rakyat

lebih berkuasa dalam pengelolaan sumber-sumber daya alam dan hasilnya mereka juga yang menikmati bukan pihak asing dan pemilik modal. Sebuah tatanan demokrasi yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat pribumi.

Dalam konteks demokratisasi Indonesia, demokrasi substansial memang belum terwujud. Indikasinya adalah tingginya angka kemiskinan yang diakibatkan oleh habisnya devisa negara untuk pembayaran hutang luar negeri dan meluasnya privatisasi yang berujung pada hilangnya kedaulatan rakyat Indonesia oleh dominasi, intervensi, dan tekanan asing (negara-negara pemberi hutang, lembaga-lembaga keuangan internasional, dan perusahaan-perusahaan multinasional atau MNC). Adanya Gerakan Anti-Globalisasi yang dipicu oleh kondisi kontradiktif tersebut dari dibukanya ruang-ruang demokrasi, demokratisasi Indonesia telah digiring pada pemenuhan kebutuhan substantif rakyat, yaitu kesejahteraan sosial-ekonomi sebagai prasyarat terwujudnya kedaulatan rakyat Indonesia seutuhnya.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dicatat dari kajian ini mencakup tujuh hal. *Pertama, gerakan anti-globalisasi dan demokratisasi merupakan gerakan sosial-politik yang bersifat transnasional.* Keberhasilan gerakan-gerakan ini akan dicapai ketika orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki kesadaran transnasional. *Kedua, gerakan anti-globalisasi merupakan salah satu gerakan alternatif untuk melakukan perubahan sosial.* Gerakan ini sangat relevan seiring semakin menguatnya ideologisasi dan politisasi fenomena globalisasi oleh negara-negara atau kelas-kelas sosial yang memiliki kepentingan untuk memperkaya diri dengan melakukan penjajahan terhadap yang lainnya. *Ketiga, gerakan anti-globalisasi dan demokratisasi merupakan implikasi globalisasi.* Apabila keberadaan gerakan anti-globalisasi merupakan antitesis dari globalisasi, maka demokratisasi merupakan sarana eksistensi ideologi globalisasi.

Keempat, gerakan anti-globalisasi merupakan alat revitalisasi demokrasi dan alat konsolidasi demokrasi akibat globalisasi. Keberadaan gerakan anti-globalisasi menjadi kebutuhan yang bersifat dasariah bagi upaya revitalisasi dan konsolidasi demokrasi yang telah disesatkan oleh ideologi globalisasi. *Kelima, gerakan anti-globalisasi mendorong demokratisasi ke ranah yang lebih substansial.* Eksistensi gerakan anti-globalisasi, sebagai kebutuhan dasariah, memiliki kapasitas untuk mengubah *status-quo* kemajuan

demokrasi yang hanya diukur pada ranah prosedural saja dan mengabaikan hal-hal yang lebih substansial. Karena itu, demokratisasi yang sejati mutlak membutuhkan gerakan anti-globalisasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Aminuddin, M. Faishal, dkk. (2009). *Globalisasi dan Neoliberalisme: Pengaruh dan Dampaknya bagi Demokratisasi Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Diamond, Larry. (2003). *Developing Democracy: Toward Consolidation*, (terj. Tim IRE). Yogyakarta: IRE Press.
- Fukuyama, Francis. (2004). *The End of History and The Last Man*, (terj. M.H. Amrullah). Yogyakarta: Qalam.
- Habibi, Muhtar, (2009). *Gemuruh Buruh Di Tengah Pusaran Neoliberalisme: Pengadopsian Kebijakan Neoliberal Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Gava Media.
- Haynes, Jeff. (2000). *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga: Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maulana, Zain, (2010). *Jerat Globalisasi Neoliberal: Ancaman Bagi Negara Dunia Ketiga*. Yogyakarta: RIAK.
- Nafis, M. Danial, (2009). *Indonesia Terjajah: Kuasa Neoliberalisme atas Daulat Rakyat*. Jakarta: INSIDE Press.
- Qodir, Zuly, (2009). *Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soepriyatno, (2008). *Nasionalisme dan Kebangkitan Ekonomi*. Jakarta: INSIDE Press.

Website

- Eko, Sutoro. (2010). "Pembangunan Politik, Pemberdayaan Politik dan Transformasi Politik" [online]. dalam http://www.ireyogya.org/sutoro/pemberdayaan_dan_transformasi_politik.pdf. [diakses 5 November 2014].
- Globaljust.org (t.t.) "Panduan Dasar Forum Sosial Indonesia (FSI)". <http://www.globaljust.org/file-sosial/prinsipdasarfsi2kolom.pdf>. [diakses 9 November 2014].

- Gunaryadi. (t.t.) “Anti-Globalisasi atau Protes Terhadap Ketidakadilan” [online]. dalam <http://indocase.nl.pdf>. [diakses 6 Nopember 2014].
- Held, David. 2007. *Models of Democracy*, (terj. Abdul Haris). Jakarta: Akbar Tandjung Institute.
- Nusantaranews. (t.t.) “Daftar Negara/Bank Kreditor Utang Terbesar Indonesia” [online]. dalam <http://nusantaranews.com/2009/03/25/daftar-negarabank-kreditor-utang-terbesar-indonesia/>. [diakses 5 November 2014].
- Prayitno, Irwan. (t.t.). “Perkembangan Demokrasi di Indonesia Cabaran dan Pengharapan” [online]. dalam http://pas.org.my/v2/kertaskerja/Perkembangan_Demokrasi_di_Indonesia_Cabaran_dan_Pengharapan.pdf. [diakses 2 November 2014].
- Tuname, Alfred. (2010). “Vitalitas Demokrasi” [online]. dalam <http://baltyra.com/2010/07/12/vitalitas-demokrasi/>. [diakses 2 November 2014].
- WALHI (t.t.). “Manifesto WALHI: Metamorfosa Gerakan Lingkungan Hidup Indonesia” [online]. dalam <http://www.walhi.or.id/in/tentang-kami/manifesto-walhi>. [diakses 1 November 2014].